

LAMPIRAN 184

ISSN 1829-7936



# PAMATOR

## Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo



Diterbitkan oleh  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### Daftar Isi

	Hal
1 Persepsi Masyarakat Bangkalan Terhadap Sistem Kelembagaan di Desa Kasus Usahatani Semi Hidroponik. (Faridz)	89
2 Analisis Pengembangan Budidaya Laut di Sumenep Untuk Mendukung Terwujudnya Madura Marikultur Estate. (Apri Arisandi dan Siti Rokhmaniati)	98
3 Analisis Konsumsi Air Tanah Akibat Sistem Pengolahan Tanah dan Tinggi Penggenangan Untuk Persiapan Tanam Padi Sawah ( <i>Oryza sativa L.</i> ) (Asfan)	106
4 Perancangan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Berdasarkan Metode Contribution Related-pay Untuk Penyesuaian Penggajian di Unit Pembangkitan Gresik, PT PJB. (Ika Deefi Anna)	114
5 Pola Transformasi Struktur Ekonomi dan Tenaga Kerja (Study Kasus: Propinsi Jawa Barat) (Teti Sugiarti)	135
6 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sejahtera Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. (Indien Winarwati)	144
7 Kasus Keracunan Makanan Suatu Kajian Yuridis. (Djulaeka)	152
8 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi (KUD Kabupaten Bangkalan). (Anugrahini Irawati)	160

**PERSEPSI MASYARAKAT BANGKALAN  
TERHADAP SISTEM KELEMBAGAAN DI DESA  
KASUS USAHATANI SEMI HIDROPONIK**

Faridz\*

**ABSTRAK**

Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) orientasi pembangunan pertanian perlu dirubah dari pertanian bersifat hanya peningkatan produksi ke pertanian bersifat Agribisnis. Hal tersebut diperlukan guna mengantisipasi terbentuknya WTO, AFTA 2003, APEC 2020, NAFTA dan MEE. Upaya yang perlu dilakukan adalah harus merubah corak pertanian tradisional ke pertanian modern yang dilandasi oleh keterpaduan sistem agribisnis, beorientasi pasar, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, pengelolaan secara profesional, sumber daya manusia yang berskualitas, teknologi tepat guna, berorientasi lingkungan dan didukung oleh kelembagaan agribisnis. Kelembagaan memiliki arti penting karena harus menggerakkan berbagai subsistem agribisnis seperti : pengadaan, penyaluran, teknologi dan sumber daya manusia; budidaya dan usaha tani; pengolahan hasil dan pemasaran. Strateginya adalah bagaimana memberdayakan kelembagaan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kelembagaan yang ada dengan masuknya teknologi baru, usahatani semihidroponik.

Penelitian ini dilakukan di empat (4) wilayah Kecamatan Bangkalan yang dipilih secara purposive, yaitu : Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger masing-masing mewakili tipologi daerah pesisir Barat, pesisir Selatan, pesisir Utara dan daerah Tengah. Responden diambil secara acak terdiri dari 30 petani, tokoh formal dan tokoh Informal masing 5 orang. Sehingga diperoleh sebanyak 120 responden petani dan 40 responden tokoh Formal dan Informal. Wawancara terstruktur, semi terstruktur dan studi kasus mendalam (in depth study) dilakukan untuk memperoleh informasi lebih akurat. Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif selanjutnya dilakukan analisa deskriptif dan inferensia melalui pemanfaatan tabulasi silang dan uji statistik. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap peran kelembagaan tidak berbeda nyata di masing-masing lokasi.
2. Persepsi peran kelembagaan di wilayah pesisir Selatan tergolong sedang. Namun di wilayah Tengah, pesisir Utara dan Barat tergolong tinggi.
3. Keterkaitan antara KUD dengan Kelompok Tani kurang erat, begitu pula antara Lembaga Keagamaan dengan Dinas (instansi) terkait.

\* Staf Pengajar Fakultas Pertanian PS TIP Unijoyo

## PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Peran tersebut pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I ditunjukkan oleh sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dan devisa negara yang cukup besar.

Mengingat pada PJP II terjadi perubahan orientasi pembangunan pertanian dari pertanian yang bersifat peningkatan produksi ke pertanian yang bersifat Agribisnis. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi perubahan lingkungan global akibat terbentuknya WTO, AFTA 2003, APEC 2020, NAFTA dan MEE yang menuntut tingkat kompetitif tinggi bagi perdagangan Indonesia.

Upaya untuk mengatasi masalah perdagangan global yang semakin kompleks dan kompetitif tersebut, maka pola pertanian industri harus dirubah dari corak tradisional ke pertanian yang modern, maju, efisien dan tangguh. Pertanian seperti yang disebutkan perlu efisiensi tinggi dan memiliki kemampuan bersaing dalam hal mutu, jumlah, kesinambungan, ketepatan dan harga. Disisi lain pengelolaan pertanian secara modern harus didasari oleh keterpaduan dalam sistem agribisnis, berorientasi pasar, pemanfaatan sumber daya secara optimal, dikelola secara profesional, didukung SDM berkualitas, menerapkan teknologi tepat guna, berwawasan lingkungan dan didukung oleh kelembagaan Agribisnis yang kuat (Hasibuan, 1999).

Kelembagaan dalam hal ini memegang peran strategis karena harus menggerakkan berbagai subsistem Agribisnis seperti : pengadaan dan penyaluran saprodi, teknologi dan SDM; budidaya dan usaha tani; pengolahan hasil pertanian (Agroindustri) dan pemasaran hasil (Hasibuan, 1999) serta dukungan kelembagaan (Solahuddin, 1998). Strategi yang perlu diperhatikan dalam rangka membangun kelembagaan yang tangguh adalah bagaimana memberdayakan kelembagaan itu sendiri.

Menelaah konsep kelembagaan, secara prinsip tidak terlepas dari konsep yang terdiri dari sejarah perkembangan kelembagaan, perubahan kelembagaan dalam pembangunan masyarakat, penyuluhan dan strategi yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat di pedesaan.

Menurut Kartasmita (1996), kelembagaan diartikan sebagai masalah tradisi baru maupun pranata baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Lebih jauh Gillin (1983) mengemukakan bahwa kelembagaan masyarakat merupakan kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, sikap dan perasaan akan persatuan yang sama. Namun masyarakat sebagai suatu sistem sosial, pengaturannya sangat kompleks karena secara sistematika ternyata setiap unsur memiliki pola hubungan tertentu seperti : pola hubungan keluarga, ekonomi, pemerintahan, agama, pendidikan dan lapisan masyarakat (Mangkuprawira, 1986). Di pedesaan kelembagaan memegang peran penting terutama bersifat kebijakan yang sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena kelembagaan di pedesaan juga dapat berfungsi sebagai mediator, konsultan dan penyedia sarana. Peran dan fungsi kelembagaan diharapkan akan optimal jika didasari oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan lembaga yang dibentuk secara top down, karena keberadaannya sering tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat aka fungsi dan perannya sering menjadi tidak efektif. Didasari oleh permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat pedesaan terhadap kelembagaan-kelembagaan yang ada dan diharapkan

dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang pengelolaan kelembagaan yang efektif terutama terhadap inovasi teknologi yang masuk seperti kasus usahatani semihidroponik.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paduan dua pendekatan yaitu : kuantitatif dan kualitatif. Data yang kompilasi meliputi dua jenis terdiri dari : 1) data rimer yang diperoleh dari wawancara dengan panduan kuesioner, orientasi lapangan (eksplorasi), 2) data sekunder diperoleh dari dinas (instansi terkait, kantor desa, kecamatan dan kabupaten). Informasi yang dikumpulkan meliputi : a) data agro teknologi, b) data sosial ekonomi dan c) data kelembagaan.

Lokasi penelitian ditentukan secara "purposive" di empat Kecamatan (daerah) di Kabupaten Bangkalan yang masing-masing mewakili karakteristik (iklim) wilayah lahan kering sesuai dengan tipologinya. Lokasi yang dipilih mewakili karakteristik pesisir sebelah Barat, pesisir sebelah Selatan, pesisir sebelah Utara dan wilayah Tengah, masing-masing adalah : Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Klampis dan Kecamatan Geger. Kemudian setiap Kecamatan dipilih dua desa secara acak. Responden yang diambil adalah masyarakat Tani, tokoh Formal dan Informal. Metode pengambilannya dilakukan secara acak sebanyak 30 petani dan 10 tokoh Formal dan Informal sebagai responden kunci. Sehingga dalam unit analisisnya diperoleh sebanyak 120 responden petani dan 40 responden tokoh Formal dan Informal.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

- a) wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan panduan kuesioner
- b) survei eksploratory, dilakukan menggunakan metode "rapid Rural Appraisal" (RRA) dan Partycipatory Rural Appraisal (PRA), yang dilakukan oleh tim dipandu oleh informan dan diskusi lapang. Partisipasi dilakukan secara terbuka saat pengenalan model semi hidroponik (teknologi masukan) dan mencatat tanggapan dan persepsinya
- c) Studi kasus, dilakukan dengan cara wawancara terstruktur dan semi terstruktur untuk memperoleh informasi lebih mendalam.

Analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan menyajikan data secara diskriptif dan inferensia. Analisis data kualitatif dilakukan pada hasil wawancara dan pengamatan secara langsung. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan pada hasil survei rumah tangga petani, tokoh Formal dan Informal menggunakan statistika dilanjutkan kajian secara inferensia.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Kelembagaan Pendukung Teknologi Baru (Usahatani Semi Hidroponik)**

Kelembagaan secara mendasar memiliki posisi strategis bagi petani, karena dapat menjadi jembatan bagi kemajuan usahatani masyarakat pedesaan. Oleh karenanya peran dan dukungan kelembagaan sangat dibutuhkan.

Kelembagaan di pedesaan selain ada yang bersifat formal juga terdapat yang bersifat informal. Kadang-kadang lembaga yang bersifat informal justru cenderung lebih dihargai dan dihormati sehingga memiliki peran cukup besar di dalam

masyarakat. Secara umum lembaga informal ini diketuai oleh tokoh masyarakat (Kyai) sebagai orang yang menjadi panutan di desa tersebut.

Beberapa kelembagaan yang ada berdasarkan pengamatan dan mempunyai hubungan dengan pengembangan usahatani di pedesaan adalah :

1. **Organisasi Kemasyarakatan**, sebagai kelembagaan bersifat informal merupakan lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang umum ada di setiap lokasi penelitian adalah organisasi keagamaan (Nahdatul Ulama). Kelembagaan ini telah mengakar di masyarakat dan memiliki peran besar terutama melalui tokoh masyarakat (Kyai). Peran kelembagaan ini sebagai koordinator anggota masyarakat dengan kelembagaan lain, memberikan motivasi dan pendidikan atau pembinaan. Masyarakat berpendapat bahwa fungsi atau peran tersebut faedahnya sangat besar. Hal ini terbukti dari jawaban responden rata-rata lebih dari 50% mengakui kelembagaan tersebut memiliki peran sangat besar seperti ditunjukkan oleh Tabel 1. Meskipun keberadaannya diakui memiliki peran positif tapi belum dimanfaatkan secara optimum karena pertemuan umumnya dilakukan malam hari kemudian cenderung bersifat kebijakan dan pembinaan, sehingga kegiatan praktek dan latihan tidak dapat dilaksanakan secara ideal. Jangkauan wilayah kerja yang terlalu luas juga menjadi faktor penyebab keberadaan penyuluh di setiap lokasi pada beberapa kasus kurang intensif dalam membina petani. Akibat lebih jauh peran organisasi tersebut sebagai : wadah berproduksi, wahana kerjasama antar anggota kelompok tani dan kelas belajar diantara petani atau anggota kelompok tani (Hasibuan, 1999) dalam pelaksanaannya kurang optimum.
2. **Kelembagaan Sarana Produksi**, merupakan kelembagaan ekonomi yang bergerak dibidang produksi, penyediaan dan penyaluran sarana produksi. Di tingkat desa kelembagaan ini berbentuk Koperasi Unit Desa (KUD), berfungsi sebagai pengecer sarana produksi langsung kepada petani sebagai konsumen, menjaga stabilitas harga dan simpan pinjam. Berdasarkan hasil pengamatan di ke empat daerah penelitian yaitu Kwanyar, Geger, Klampis dan Bangkalan ternyata masing-masing cenderung memberikan jawaban kurang berhasil terhadap peran yang dimiliki KUD tersebut. Hal ini terbukti persentase jawaban mereka terhadap keberhasilan peran fungsi tersebut relatif sangat kecil yaitu : 26,67 %, 33,33 %, 80,00 % dan 36,67 %. Sedangkan peran sebagai penstabil harga, jawaban responden juga relatif rendah yaitu 16,67 %, 23,33 %, 30,00 % dan 40,00 % yang membuktikan bahwa perannya masih sangat kecil. Hal yang sama juga terjadi pada peran simpan-pinjamnya, responden masih menganggap perannya masih sangat kecil. Hal ini ditunjukkan jawaban responden yang relatif kecil terhadap peran tersebut yaitu 30 %, 30 %, 20 % dan 33,33% masing-masing untuk Kwanyar, Geger, Klampis dan Bangkalan. Kekurang berhasil lembaga ini secara umum tidak terlepas dari sumber daya manusianya yang masih sangat terbatas sehingga sistem pelayanan, sistem informasi dan administrasinya tidak banyak diterapkan dan tidak optimal. Terdapat pula kecenderungan dari petani bahwa melalui KUD justru lebih mahal dari pada mereka membeli sendiri, selanjutnya keberadaan KUD sering hanya menjadi simbol saja. Melihat kondisi di atas perlu ada revitalisasi kembali fungsi KUD tersebut untuk mengembalikan kepercayaan petani terhadap lembaga ini (lihat Tabel 1). Keadaan ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang bersifat topdown dan keproyekan, sehingga

- sebagai suatu tata nilai kelembagaan tersebut kurang memberikan makna kepada masyarakat.
3. **Kelembagaan Usahatani**, merupakan kelembagaan yang bergerak dalam usahatani produksi mulai dari yang paling kecil rumah tangga petani kemudian meningkat sampai pada kelembagaan yang lebih luas yaitu kelompok tani. Kelompok tani sebagai bentuk lembaga yang lebih maju dan terorganisir, memiliki fungsi sebagai proses belajar mengajar (transfer ilmu), kerjasama atau koordinasi antara anggota maupun kelompok dan peningkatan usahatani atau sebagai wadah produksi. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa peran-peran tersebut disadari betul oleh petani. Responden menganggap bahwa peran kelompok tani di keempat daerah penelitian sebagai transfer ilmu dianggap berhasil, hal ini terbukti dari jawaban mereka terhadap peran tersebut yaitu : Kwanyar 63,33 %, Geger 76,33 %, Klampis 63,33% dan Bangkalan 90 %. Melihat hubungan kerjasama antara anggota kelompok tani tidak saja hanya merupakan transfer ilmu semata-mata tetapi di luar proses tersebut akan terjadi kontak-kontak antara perorangan dari anggota kelompok tani tersebut. Kontak-kontak ini cenderung membentuk suatu kerjasama antara 1 – 2 orang atau lebih dalam mengelolanya usahatannya misalnya dalam hal penyediaan sarana produksi, pengelolaan tanah, pengairan dan pemberantasan hama-penyakit. Kerjasama antara anggota kelompok tani ternyata walaupun tidak terjadi secara intensif namun jalinan kerjasama-koordinasinya telah relatif cukup tinggi. Persentase yang diperlihatkan peran kerjasama paling tinggi adalah daerah Geger yaitu 73,33 %, kemudian berurutan daerah Bangkalan 66,67 %, Kwanyar 56,67 % dan Klampis 53,33 %. Namun demikian masih perlu perhatian adalah penilaian terhadap kurang perannya kelompok tani masih relatif tinggi yaitu rata-rata 35,84 %. Hal ini terjadi karena rutinitas pertemuan anggota terkadang masih sangat tergantung pada penyuluh dan bukan atas inisiatif sendiri. Selain itu masih terdapat pula ketidakseragaman kepentingan dalam kelompok yang sering tidak diungkapkan oleh anggota sehingga cenderung mengambil keputusannya sendiri. Faktor lain adalah beragamnya lahan memberikan pertimbangan tersendiri bagi mereka untuk mengambil keputusan tanpa harus tergantung kepada yang lain. Berkait dengan peran kelompok tani sebagai wadah berproduksi ternyata di masing-masing daerah persentase keberhasilan perannya cukup tinggi yaitu : 63,33 %, 66,67 %, 60,00 % dan 63,33 % masing-masing untuk daerah Kwanyar, Geger, Klampis dan Bangkalan. Peran ini disadari oleh mereka bahwa kelompok tani akan dikatakan berhasil apabila mampu mensejahterakan anggotanya dengan indikator meningkatnya produksi pertanian dan pendapatan anggotanya. Namun demikian perlu mendapat perhatian adalah responden yang menjawab kurang berhasil masih relatif besar yaitu rata-rata di atas 30 %. Hal ini dapat menjadi potensi perpecahan dalam kelompok tani tersebut, disebabkan ketidak kompakannya anggotanya selanjutnya berakibat terhadap peran-peran secara menyeluruh menjadi kurang berfungsi. Oleh karena itu penting bagi ketua kelompok untuk dapat menjembatani berbagai kepentingan anggota yang ada di dalam kelompok, terutama yang menyangkut perbedaan jenis lahan, jenis tanaman, kesuburan dan kesejahteraan.
  4. **Kelembagaan Penyuluhan**, adalah kelembagaan yang secara prinsip memberikan pelayanan atau pembinaan terhadap petani. Lembaga ini memiliki peran strategis karena harus bersentuhan dan berhubungan langsung dengan petani. Berdasarkan

hasil pengamatan terhadap fungsi atau peran pembinaan yang telah dilakukan oleh penyuluh terhadap petani di ke empat daerah memperlihatkan bahwa rata-rata 69 % responden berpendapat tugas tersebut telah dijalankan sesuai dengan perannya. Sedangkan pada aspek pelayanan yang menjembatani kebutuhan petani dengan pihak luar atau instansi terkait terlihat bahwa penyuluh berperan sangat baik, persentase rata-rata jawaban responden di keempat daerah di atas 90 %. Secara terinci jawaban di keempat daerah adalah sebagai berikut : Kwanyar 90 %, Geger 96,67 %, Klampis 83,33 % dan Bangkalan 96,67 %.

Hasil uji menggunakan Khi-Kuadrat ( $X^2$ ) terhadap persentase jawaban responden dari masing-masing daerah (Tabel 1) ternyata secara umum tidak memperlihatkan ada perbedaan persepsi. Keadaan ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap keberhasilan, kekurangan keberhasilan dan ketidak berhasilan lembaga yang ada di desa tersebut relatif sama. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa lembaga keagamaan perannya cukup berhasil memposisikan diri sesuai fungsinya. Sedangkan lembaga koperasi dianggap masih kurang berhasil berperan sesuai fungsinya. Namun demikian peran lembaga kelompok tani dan penyuluh masih dapat diharapkan karena perannya relatif dianggap cukup berhasil oleh responden di keempat daerah tersebut.

**Tabel 1. Persepsi masyarakat terhadap Beberapa Kelembagaan yang ada di Pedesaan**

Peran Kelembagaan	Kwanyar (Pesisir Selatan)			Geger (Daerah Tengah)			Klampis (Pesisir Utara)			Bangkalan (Pesisir Barat)			X <sup>2</sup> Hit
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
	%												
<b>Keagamaan</b>													
- Koordinasi Masyarakat	83,33	10,00	6,67	93,33	6,67	0,00	80,00	16,67	3,33	96,67	3,33	0,00	7,49
- Pemberi Motivasi	83,33	10,00	6,67	93,33	6,67	0,00	80,00	20,00	0,00	96,67	3,33	0,00	11,31
- Pendidikan	76,67	13,33	10,00	80,00	20,00	0,00	63,33	30,00	6,67	93,33	3,33	3,33	11,88
<b>Koperasi Unit Desa</b>													
- Pengecer	26,67	40,00	33,33	33,33	40,00	26,67	30,00	43,33	26,67	36,67	43,33	20,00	1,61
- Stabilitas Harga	16,67	50,00	33,33	23,33	46,67	30,00	30,00	50,00	20,00	40,00	40,00	20,00	5,32
- Simpan Pinjam	30,00	50,00	20,00	30,00	53,33	16,67	20,00	53,33	26,67	33,33	33,33	33,33	4,83
<b>Kelompok Tani</b>													
- Belajar Mengajar	63,33	26,67	10,00	76,67	20,00	3,33	63,33	23,33	13,33	90,00	6,67	3,33	8,61
- Kerjasama Anggota	56,67	43,33	0,00	73,33	26,67	0,00	53,33	43,33	3,33	66,67	26,67	6,67	7,26
- Peningkatan Produksi	63,33	33,33	3,33	66,67	33,33	0,00	60,00	33,33	6,67	63,33	36,67	0,00	3,85
<b>Aparatur/ Penyuluh</b>													
- Pembinaan	66,67	33,33	0,00	76,67	23,33	0,00	60,00	36,67	3,33	83,33	16,67	0,00	7,11
- Pelayanan	90,00	6,67	3,33	96,67	3,33	0,00	86,67	10,00	3,33	96,67	3,33	0,00	3,82
- Pemimpin	66,67	20,00	13,33	73,33	23,33	3,33	66,67	16,67	16,67	76,67	20,00	3,33	5,29

Keterangan : a) 1 = Berhasil, 2 = Kurang berhasil, 3 = Tidak berhasil  
 b)  $X^2$  Tabel (db = 6); 5 % = 12,592; 1 % = 16,812  
 c) Masing-masing responden 30

Lebih jauh persepsi yang diperlihatkan oleh masyarakat terhadap kelembagaan yang ada di lokasi (daerah) penelitian ternyata tergolong sedang sampai tinggi. Persepsi yang tergolong sedang, ditunjukkan oleh masyarakat di daerah Kwanyar (Pesisir Selatan), sedang di daerah Geger (Daerah Tengah), daerah Klampis (Pesisir Utara) dan Bangkalan (Pesisir Barat) persepsi mereka tergolong tinggi (lihat Tabel 2). Persepsi relatif baik tersebut terjadi karena terdapat jalinan koordinasi cukup baik antar lembaga, walaupun tidak pada semua tataran lembaga yang ada terutama dalam berbagai pelaksanaan yang mendukung usahatani yang dilakukan oleh petani.

**Tabel 2. Skor Persepsi Responden Terhadap Peran Kelembagaan**

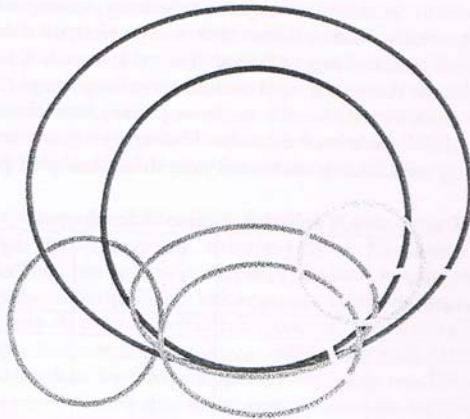
Lembaga	Kwanyar Pesisir Selatan)	Geger Daerah Tengah)	Klampis Pesisir Utara)	Bangkalan Pesisir Barat)
Keagamaan	246	260	244	265
KUD	166	184	226	191
Kelompok Tani	231	244	226	243
Penyuluh	242	253	237	256
<b>Rata-rata</b>	<b>221,25</b>	<b>235,00</b>	<b>233,25</b>	<b>238,75</b>

Keterangan : Tinggi = > 225  
Sedang = 138 - 225  
Rendah = < 135

Kondisi di atas merupakan potensi yang perlu dilestarikan dan dikembangkan karena akan memberikan dampak yang baik dalam mendukung pelaksanaan teknologi baru (usahatani semi hidroponik). Namun harus diperhatikan bahwa peran lembaga KUD masih perlu ditingkatkan karena masyarakat menilai kinerja dari lembaga ini masih kurang, terbukti bahwa persepsi masyarakat masih tergolong sedang terhadap peran lembaga ini.

Telah dikemukakan bahwa koordinasi antar lembaga memegang peran penting dalam pengembangan usahatani di daerah lokasi. Keadaan tersebut dilukiskan dalam Gambar 1, yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap hubungan suatu lembaga serta tingkat keakraban atau koordinasi diantara lembaga tersebut. Hubungan atau koordinasi antar lembaga dilukiskan oleh besar (luas) irisan (interseksi) yang ditimbulkan oleh masing-masing lingkaran, dimana setiap lingkaran mewakili suatu lembaga. Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa peran KUD masih kurang. Terlihat walaupun memiliki keterkaitan dan hubungan yang besar dengan kontak tani namun secara umum hubungan tersebut relatif kecil dengan pihak kelompok tani. Demikian pula hubungan yang terjadi dengan penyuluh pertanian. Sedangkan Dinas terkait (Pertanian) dan lembaga keagamaan digambarkan terpisah dengan KUD. Sedangkan antara Dinas (instansi) Pertanian dengan kontak tani dan kelompok tani hanya memiliki irisan kecil. Padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam hal pembinaan. Hal ini memberikan ilustrasi bahwa walaupun masyarakat menganggap peran lembaga tersebut telah dijalankan relatif sesuai fungsinya namun belum merasakan ada keterpautan antar lembaga yang ada dalam aspek pembinaan. Keadaan ini terjadi karena biasanya kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi hanya berlangsung saat proyek diselenggarakan dan umumnya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain tidak sinambung.





**Gambar 1. Diagram Keterkaitan dan koordinasi Anatar Lembaga**

Keterangan :	Masyarakat	Penyuluh
—	Kelompok Tani	Dinas/instansi terkait
—	Kontak Tani	Koperasi Unit Desa
	Lembaga keagamaan (pondok)	
Lingkaran Terpisah	= Tidak ada kontak	
Lingkaran Bersentuhan	= Informasi lewat	
Irisan kecil	= Koordinasi dalam mengambil keputusan	
Irisan besar	= Koordinasi dalam mengambil keputusan penting	

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan kajian Peran Kelembagaan Terhadap Masukan Inovasi Teknologi (Rekayasa Usahatani Semi Hidroponik) di Kabupaten Bangkalan disimpulkan :

1. Persepsi masyarakat terhadap peran kelembagaan tidak berbeda nyata di masing-masing lokasi. Namun persepsinya terhadap peran kelembagaan di wilayah pesisir Selatan tergolong sedang. Tetapi untuk wilayah Tengah, pesisir Utara dan Barat tergolong tinggi.
2. Keterkaitan antara Koperasi Unit Desa dengan Kelompok Tani cenderung kurang erat begitu pula antara Lembaga Keagamaan dengan Dinas (Instansi) terkait sebagai lembaga pembina.

#### Saran

Dalam rangka pengembangan usahatani semi hidroponik dan inovasi teknologi secara umum di Kabupaten Bangkalan perlu :

1. Informasi yang terpadu antara lembaga terkait dengan petani diharapkan selalu terjalin.

Persepsi Masyarakat Bangkalan .....Faridz

2. Paket teknologi terpadu sebagai acuan yang dapat digunakan penyuluh untuk pembinaan.
3. Kelembagaan yang dibentuk hendaknya bersifat partisipatif (Institution by participation).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, N. 1999. Kelembagaan Pendukung bagi Pengembangan Agribisnis di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Dalam R. Wibowo (ed.) Refleksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Kartasmita , G. 1996. Pembangunan Menuju Bangsa dan Masyarakat yang Mandiri. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gillin, 1988. Traditional Society in Communities. Oxford University Press, USA.
- Mangkuprawira, S. 1986. Metode Pemecahan Masalah Masyarakat. Penerbit Universitas Lampung.
- Solahuddin, S. 1998. Reformasi Pembangunan Pertanian, Program Jangka Pendek Peningkatan Produksi Pangan.